

PERTEMUAN KE VIII
Mata Kuliah : Pengantar Ilmu Politik
By : Evi Yunita Kurniaty, S.Sos, M.IP

DEMOKRASI

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu "Demos" yang berarti rakyat dan "Kratos" yang berarti kekuasaan. Secara bahasa Demokrasi adalah kekuasaan yang berada ditangan rakyat (pemerintahan rakyat). Maksud dari pemerintahan rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Jadi demokrasi adalah sebuah bentuk sistem pemerintahan dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh pemerintah.

Pengertian demokrasi menurut beberapa pakar yaitu

- Abraham Lincoln : Menurut dia, pengertian demokrasi yaitu sistem pemerintah yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat serta untuk rakyat.
- Charles Costello : Menurut Charles Costello, pengertian demokrasi yaitu sistem sosial serta politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi dengan hukum serta rutinitas membuat perlindungan hak-hak perseorangan warga negara
- C. F. Strong : Demokrasi menurut pengertian C. F. Strong yaitu satu system pemerintahan di mana sebagian besar anggota dewan dari orang-orang turut dan dalam politik atas basic system perwakilan yang menanggung pemerintah pada akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya pada sebagian besar itu.
- Hannry B. Mayo : Menurut Hannry B. Mayo, pengertian demokrasi yaitu kebijaksanaan umum ditetapkan atas dasar sebagian besar oleh wakil-wakil yang dipantau dengan cara efektif oleh rakyat dalam beberapa penentuan yang didasarkan dari prinsip persamaan politik serta diselenggaran dalam situasi dimana berlangsung kebebasan politik.
- Samuel Huntington : Menurut dia, demokrasi yaitu para pembuat ketentuan kolektif yang paling kuat dalam satu system diambil lewat satu penentuan umum yang adil, jujur serta berkala serta di dalam system itu beberapa calon bebas berkompetisi untuk peroleh suara serta hampir semua masyarakat dewasa bisa diberikan suara

Macam-Macam Demokrasi

a. Macam-Macam Demokrasi Berdasarkan Penyaluran Kehendak Rakyat

- ✓ Demokrasi Langsung (*Direct Democracy*): Pengertian demokrasi langsung adalah demokrasi yang secara langsung dalam melibatkan rakyat untuk pengambilan keputusan terhadap suatu negara. Demokrasi langsung, rakyat secara langsung berpartisipasi dalam pemilihan umum dan menyampaikan kehendaknya.
- ✓ Demokrasi Tidak Langsung (*Indirect Democracy*): Pengertian demokrasi tidak langsung adalah demokrasi yang tidak secara langsung melibatkan seluruh rakyat suatu negara dalam pengambilan keputusan. Demokrasi tidak langsung, rakyat menggunakan wakil-wakil yang telah dipercaya untuk menyampaikan aspirasi dan kehendaknya. Sehingga dalam demokrasi tidak langsung wakil rakyat terlibat secara langsung dengan menajdi perantara seluruh rakyat.

b. Macam-Macam Demokrasi Berdasarkan Fokus Perhatiannya

- ✓ Demokrasi Formal: Pengertian demokrasi formal adalah demokrasi yang berfokus dari bidang politik tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi
- ✓ Demokrasi Material: Pengertian demokrasi material adalah demokrasi yang berfokus di bidang ekonomi tanpa mengurangi kesenjangan politik.
- ✓ Demokrasi Gabungan: Pengertian demokrasi gabungan adalah demokrasi yang berfokus sama besar baik di bidang politik dan ekonomi.

Ciri-Ciri Demokrasi

Ciri-Ciri Pemerintahan Demokrasi - Ciri-ciri demokrasi digambarkan dalam suatu pemerintah didasarkan atas sistem demokrasi adalah sebagai berikut

- ✓ Pemerintah berdasarkan kehendak dan kepentingan rakyat banyak.
- ✓ Ciri Konstitusional, yaitu mengenai kepentingan, kehendak ataupun kekuasaan rakyat yang dituliskan di konstitusi dan undang-undang negara.
- ✓ Ciri Perwakilan, yaitu dalam mengatur negaranya, kedaulatan rakyat diwakilkan dari beberapa orang yang sudah dipilih oleh rakyat itu sendiri.
- ✓ Ciri Pemilihan umum, Yaitu suatu kegiatan politik yang dilakukan untuk memilih pihak dalam pemerintahan

- ✓ Ciri Kepertaian, yaitu partai menjadi sebuah sarana atau media sebagai bagian pelaksanaan sistem demokrasi
- ✓ Ciri kekuasaan, yaitu terdapat pembagian dan juga pemisahan kekuasaan
- ✓ Ciri Tanggung Jawab, yaitu dengan adanya tanggung jawab baik pihak yang telah terpilih dapat ikut dalam pelaksanaan suatu sistem demokrasi

Kelebihan dan Kekurangan Demokrasi

Kelebihan/Keuntungan Demokrasi

- ✓ Pemegang kekuasaan dipilih menurut suara dan keinginan rakyat
- ✓ Mencegah adanya monopoli kekuasaan
- ✓ Kesetaraan hak membuat setiap masyarakat dapat ikut serta dalam sistem politik

Kekurangan/Kelemahan Demokrasi

- ✓ Kepercayaan rakyat dapat dengan mudah digoyangkan melalui pengaruh-pengaruh misalnya media
- ✓ Kesetaraan hak dianggap tidak wajar karena menurut para ahli, setiap orang memiliki pengetahuan politik yang tidak sama
- ✓ Konsentrasi pemerintah yang sedang menjabat akan memudar disaat dekatnya pemilihan umum berikutnya

Nilai-Nilai Demokrasi

Demokrasi memiliki nilai-nilai antara lain sebagai berikut:

- ✓ Menjamin tegaknya keadilan
- ✓ Menekan adanya penggunaan kebebasan seminimal mungkin
- ✓ Adanya pergantian kepemimpinan dengan teratur
- ✓ Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga
- ✓ Menjamin terselenggaranya perubahan yang terjadi di masyarakat dengan damai atau tanpa adanya gejolak
- ✓ Mengakui dan menganggap wajar adanya perbedaan atau keanekaragaman.

Demokrasi di Indonesia

Demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat pelbagai tafsiran serta pandangan. Tetapi yang tidak dapat disangkal ialah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemen. Selain itu Undang-Undang Dasar kita menyebut secara eksplisit dua prinsip yang menjiwai naskah itu, dan yang dicantumkan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai Sistem Pemerintahan Negara yaitu:

1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*). Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasar—kan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).
2. Sistem Konstitusional: Pemerintahan berdasarkan atas Sistem Konstitusi (Hukum Dasar), tidak bersifat Absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Berdasarkan dua istilah *Rechtsstaat* dan sistem konstitusi, maka jelaslah bahwa demokrasi yang menjadi dasar dari Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemen ialah demokrasi konstitusional. Di samping itu corak khas demokrasi Indonesia, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dimuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar.

Sesudah tertumpasnya G 30 S/PKI pada tahun 1965 sudah terang bahwa yang kita cita-citakan itu adalah demokrasi konstitusional, tetapi tidak dapat disangkal bahwa dalam masa Demokrasi Terpimpin kita sedikit banyak telah terpengaruh oleh beberapa konsep komunis berkat kelihaihan PKI untuk menyusupkan konsep-konsep dari alam pikiran komunisme ke dalam kehidupan politik kita pada masa pra-G 30 S/PKI. Maka dari itu perlu kiranya kita menjernihkan pikiran kita sendiri dan meneropong dua aliran pikiran utama yang sangat berbeda, bahkan sering bertentangan serta berkonfrontasi satu sama lain, yaitu demokrasi konstitusional dan demokrasi yang berdasarkan Marxisme-Leninisme. Perbedaan fundamental ialah bahwa demokrasi konstitusional mencita-citakan pemerintah yang terbatas kekuasaannya, suatu Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang tunduk kepada Rule of Law. Sebaliknya, demokrasi yang mendasarkan dirinya

atas komunisme mencita-citakan pemerintah yang tidak boleh dibatasi kekuasaannya (machsstaat), dan yang bersifat totaliter.

Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengaiami pasang surut. Selama 25 tahun berdirinya Republik Indonesia ternyata masalah pokok yang kita hadapi ialah bagaimana, dalam masyarakat yang beraneka ragam pola budayanya, mempertinggi tingkat kehidupan ekonomi di samping membina suatu kehidupan sosial dan politik yang demokratis. Pada pokoknya masalah ini berkisar pada penyusunan suatu sistem politik di mana kepemimpinan cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi serta nation building, dengan partisipasi rakyat seraya menghindari timbulnya diktator, apakah diktator ini bersifat perorangan, partai, ataupun militer.

Dipandang dari sudut perkembangan demokrasi sejarah Indonesia dapat di bagi dalam empat masa, yaitu:

- a. Masa Republik Indonesia I (1945-1959), yaitu masa demokrasi (konstitusional) yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai dan yang karena itu dapat dinamakan Demokrasi Parlementer.
- b. Masa Republik Indonesia II (1959-1965), yaitu masa Demokrasi Terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasannya, dan menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat.
- c. Masa Republik Indonesia III (1965-1998), yaitu masa Demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial.
- d. Masa Republik Indonesia IV (1998-sekarang), yaitu masa Reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi pada masa Republik Indonesia III.